



## Pengujian kualitas informasi laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah

<sup>1,\*</sup>Sri Widodo

<sup>2</sup>Ria Resti Maharani

<sup>1,2</sup>Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

\*corresponding author: [widodosri@upy.ac.id](mailto:widodosri@upy.ac.id)

**Abstract:** This aim of this research to know the effect of human resources quality, information technology utilization, internal control systems and supervision of the reliability and timeliness in regional financial reporting. The research was done in Organisasi Perangkat Daerah OPD Bantul. The obtained by questionnaires distributed to 129 respondents employee of the finance / accounting department. The method used in this research is multiple linear regression method. The results shows that first the of human resources quality, internal control systems, and supervision is significantly affected to the reliability and timeliness of regional financial reporting. Both the human resources quality, information technology utilization, and supervision do not affected to the reliability and timeliness of regional financial reporting.

**Keywords:** Human Resources Quality; Information Technology Utilization; Internal Control Systems; Supervision; Reliability And Timeliness.

### 1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan pemerintah yang ada di Indonesia menarik untuk diuji karena meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas lembaga-lembaga publik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Pemerintah bertanggungjawab atas laporan keuangan yang akuntabel dengan menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2009). Informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya adalah informasi yang memiliki sifat relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan mampu untuk dimengerti (Ariesta, 2013).

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu (*timeliness*). Ketepatanwaktuan pada laporan keuangan adalah adanya informasi untuk para pihak yang berkepentingan pada saat diperlukan sebelum informasi kehilangan esensi yang dapat mengubah keputusan (Eristanti & Putra, 2018). Laporan keuangan yang andal jika tidak menjerumuskan dan bebas dari kesalahan material, ditampilkan apa adanya tanpa mengurangi maupun melebih-lebihkan, dan dapat dibuktikan kebenarannya (Sari & Witono, 2014).

Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah menyatakan bahwa banyak daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih terdapat permasalahan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang ditemukan antara lain penatausahaan dan penggunaan aset tetap, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS, Pengelolaan pajak dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang belum dilaksanakan dengan tertib. Permasalahan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku antara lain sedikitnya kapasitas pekerjaan fisik, pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran dan bendahara BOS belum

tertib, dan penyelesaian proses sewa-beli perumahan sub-inti belum tuntas dilaksanakan ([semarang.bpk.go.id](http://semarang.bpk.go.id)). Fenomena ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah saat ini belum memenuhi kriteria andal.

Kemampuan individu sebagai pengguna laporan keuangan diwajibkan memiliki keahlian atau memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang serta keterampilan di bidang akuntansi. Sumber daya manusia memiliki fungsi yang penting dalam memperoleh informasi yang berkualitas (Wahyono, 2004; Ariesta, 2013). Kualitas sumber daya manusia yang memadai didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan saat pengelolaan informasi sehingga laporan keuangan bersifat andal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang. Hambatan yang membuat penerapan teknologi informasi kurang optimal pada pemerintah daerah antara lain keadaan *hardware*, *software* yang dipakai, pemutakhiran data, keadaan individu, dan kurangnya biaya (Inayati & Reuni, 2018).

Sistem pengendalian intern merupakan suatu kaidah yang menuntun, memantau, dan menilai individu serta berfungsi menemukan dan mencegah terjadinya kecurangan sehingga laporan keuangan menghasilkan keyakinan keandalan (Wardani & Andriyani, 2017). Pemerintahan seharusnya menerapkan pengendalian intern secara efektif untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah mencapai tujuan yang tampak dalam keterandalan laporan keuangan, perlindungan aset, dan menaati peraturan yang berlaku (Yanto, 2019).

Pengawasan keuangan daerah dilakukan demi menjaga supaya aktivitas pemerintah daerah tidak menyeleweng dari visi dan konsep yang sudah dibuat (Yanto, 2019). Proses pengelolaan laporan keuangan daerah yang kurang diawasi akan menyebabkan kelalaian dalam pengelolaan sehingga penyusunan dan pelaporan kurang tertib, komitmen terhadap kompetensi yang kurang, aktivitas identifikasi dan analisis risiko belum optimal, kurangnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang belum cermat dan tidak dicatat yang tepat (Putra *et al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Witono (2014), Ariesta (2013) dan Wardani & Andriyani, (2017) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan pengawasan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andelina, (2017), Marlina & Wardani, (2018), dan Basuki *et al.* (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti akan menguji kembali variabel yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai variabel yang berdampak pada pelaporan keuangan sudah banyak dilakukan namun pada perusahaan swasta. Berdasarkan penelitian Elviani (2017), Mareta (2015), Attarie (2016), dan Pujiatmi & Ismawati (2018) variabel yang berdampak pada ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan swasta yaitu profitabilitas, struktur kepemilikan, opini Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan, dan reputasi KAP. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali secara

empiris variabel apa saja yang berdampak terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah demi lebih memperhatikan dan waspada terhadap faktor-faktor yang berdampak terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. Kajian Teori**

### **2.1. Teori Keagenan**

Menurut [Mardiasmo \(2009\)](#) akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk keharusan pihak yang dipercaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyediakan, memberitahukan dan memaparkan segenap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan serta memegang kebebasan dan wewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik meliputi pertanggungjawaban akan manajemen dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Teori keagenan menerangkan bahwa agen akan berpandangan oportunitis dan condong tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang diberikan pemerintah daerah selaku pihak manajer tidak sekedar menampilkan laporan keuangan yang sempurna dan lazim, melainkan seperti apa pemerintah berupaya terbuka demi para pemakai laporan keuangan. Pemerintah daerah tentu berupaya untuk memberikan informasi bahwa kinerjanya tertib dan akuntabel dalam penyelenggaraan laporan keuangan daerah yang wajib ditunjukkan dengan penyampaian laporan keuangan yang andal ([Azlan et al., 2015](#)).

Menurut [Eisenhardt, \(1989\)](#) teori keagenan ditekankan untuk menangani masalah-masalah terkait keagenan. Pertama, masalah keagenan ada pada waktu hasrat atau visi dari prinsipal dan agen berlawanan adalah suatu hal yang sulit bagi prinsipal untuk melaksanakan pengecekan apa yang telah dilakukan oleh agen. Kedua, masalah penguraian resiko pada waktu prinsipal dan agen mempunyai pendirian yang berlawanan terhadap resiko.

### **2.2. Teori Kepatuhan**

Individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap benar dan sesuai dengan kaidah. Komitmen normatif melalui personal (*normative commitment through morality*) diartikan mentaati peraturan sebab otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku ([Rachmawi et al., 2016](#)). Pemerintah sebagai pelaku yang mengelola dan menerapkan amanat rakyat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan operasional daerah sepanjang 1 periode. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterikatan untuk patuh pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### **2.3. Pelaporan Keuangan Daerah**

Menurut [Suwardjono \(2014\)](#) pelaporan keuangan merupakan susunan dan kegiatan akuntansi yang memaparkan dengan cara apa informasi keuangan diselesaikan dan disampaikan demi meraih visi pelaporan keuangan serta membantu mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Proses akuntansi dalam penyampaian keuangan ialah pekerjaan dan hubungan antara pihak-pihak terkait dan prasarana penyampaian hingga dapat mewujudkan informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan ditata untuk mempersiapkan informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dalam 1 periode pelaporan keuangan. Fungsi utama laporan keuangan yaitu untuk memahami seberapa sumber daya ekonomi yang digunakan demi menjalankan pekerjaan operasional pemerintahan, memperhitungkan keadaan keuangan, mengevaluasi efektif dan efisien entitas pelaporan, serta mendukung mewujudkan ketaatan terhadap peraturan yang ada.

Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan pemerintah adalah prasyarat yang telah tertera dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dimengerti. Laporan keuangan pemerintah patut dibuat dan disajikan dengan metode yang mempunyai jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam penyajiannya. Hal ini dilakukan supaya tercapai akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (KKAP paragraf 22).

### **2.4. Keterandalan Pelaporan Keuangan**

Kriteria pembentuk kualitas informasi yang membuat informasi dalam laporan keuangan memegang nilai atau fungsi yang dipaparkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah terdiri dari relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Keterandalan artinya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyamarkan dan sesat dalam menyajikan kenyataan, serta sanggup dibuktikan kebenarannya. Penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dapat diandalkan dapat menyamarkan penggunaan informasi ([Sari, 2019](#)).

### **2.5. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan**

Ketepatanwaktuan atau *timeliness* menunjukkan kira-kira waktu penyampaian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang disajikan dengan tepat waktu disebabkan oleh keahlian manajer dalam merespon setiap tindakan atau hambatan ([Yuliani et al., 2016](#)). Ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan begitu mempengaruhi ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan yang tepat waktu tidak hanya bermanfaat bagi organisasi sektor publik namun juga berdampak pada organisasi non sektor publik. Ketepatanwaktuan adalah siapnya informasi untuk pihak yang berkepentingan pada saat diinginkan sebelum informasi kehilangan esensi

dalam pengambilan keputusan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

## **2.6. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Suatu informasi yang andal atau bernilai memiliki dua elemen, yaitu individu yang bisa mendapatkan informasi serta informasi yang telah didaptkannya (Ariesta, 2013). Suatu organisasi tentu memiliki sumber daya manusia yang mengerjakan tujuan organisasi, pembaruan serta meraih visi organisasi. Manusia merupakan faktor yang bisa mempengaruhi faktor organisasi lainnya secara langsung dalam mencapai misi organisasi (Darwanis & Mahyani, 2009).

Manajemen sumber daya manusia dalam suatu entitas ialah sesuatu yang begitu berharga bagi organisasi, sebab sumber daya manusia merupakan poin penting suatu organisasi (Hariandja, 2002). Sumber daya manusia selaku pemakai sistem organisasi dituntut untuk makin menguasai akuntansi atau memiliki keingintahuan yang tinggi untuk memperkuat keahliannya di bidang akuntansi. Kemahiran sumber daya manusia akan berdampak pada organisasi dalam membuat informasi yang bernilai atau andal (Ariesta, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Witono, (2014) dan Marlina & Wardani, (2018) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam mengelola laporan keuangan milik pemerintah daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1a</sub>: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah*

Secara umum hasil temuan BPK menunjukkan adanya masalah administrasi, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang kompeten. Temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Yanto, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dapat mendorong mempercepat penyampaian laporan keuangan daerah hingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu. Beberapa penelitian membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah (Sari & Arza (2016; Basuki *et al.*, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1b</sub>: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah*

## **2.7. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini tidak hanya digunakan oleh organisasi bisnis namun juga organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah (Sari *et al.*, 2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi susunan strategi yang dimulai dari penghimpunan data, pendataan, pengikhtisaran, hingga

pemberitahuan keuangan ketika rencana pertanggungjawaban penerapan APBD yang dilaksanakan secara manual maupun memakai aplikasi komputer. Teknologi informasi yang maju dengan cepat serta pemanfaatannya yang semakin luas mampu memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayaguna informasi keuangan daerah dengan cepat dan pasti (Ariesta, 2013). Pemerintah perlu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan jaringan sistem informasi manajemen serta kegiatan pekerjaan secara terpadu. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Mahyani (2009), Azlan, Herwanti, & Pituringsih (2015) dan Wahyudi & Basri (2016) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2a</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah*

Laporan keuangan dapat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi yang akan mempercepat kegiatan pengelolaan bukti transaksi dan laporan keuangan pemerintahan akan disajikan dengan tepat waktu (Ariesta, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Arza, (2016), Marlina & Wardani (2018) dan Basuki *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2b</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah*

## **2.8. Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah suatu rangkaian tindakan ataupun aktivitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta semua pegawai untuk memberi kepercayaan atas tercapainya visi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Pengendalian intern adalah kiat untuk menuntun, memantau, dan menilai sumber daya yang ada di organisasi, serta mengantisipasi dan mendeteksi manipulasi.

Pengendalian intern terdiri dari kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan memastikan informasi keuangan yang andal, serta hukum dan peraturan yang ada ditaati. Suatu organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang baik maka kegiatan penyelenggaraan keuangan dapat dituntun, dipantau serta dapat ditemukan jika ada kecurangan sehingga laporan keuangan menyediakan informasi yang andal (Wardani & Andriyani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Andriyani (2017), Darwanis & Mahyani (2009), dan Wahyudi & Basri (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3a</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah*

Penyajian laporan keuangan yang tidak tepat waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan masih atau tidak melaksanakan nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Ketidaktepatwaktuan penyajian laporan keuangan juga berhubungan dengan pengendalian internal yang diterapkan yaitu kurang ditaati (Sari & Witono 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Marlina & Wardani (2018) dan Sari & Arza (2016) menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3b</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah*

## **2.9. Pengawasan**

Pengawasan keuangan daerah ialah tindakan yang dilakukan demi menjaga agar pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Pengawasan digunakan untuk menyadari apakah konsep yang dibuat bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan ekonomis (Putra *et al.*, 2017). Sistem akan berjalan dengan lancar jika ada pengawasan yang menjamin sistem bergerak sesuai dengan apa yang direncanakan, untuk mendorong kualitas laporan keuangan yang bermutu (Yanto, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Inayati & Reuni (2018), Putra *et al.* (2017), Yanto (2019), dan Azlan *et al.* (2015) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>4a</sub>: Pengawasan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah*

Hasil penelitian Miharja *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa masih ada pengawasan keuangan di pemerintah daerah yang belum maksimal sehingga pelaporan keuangan pemerintah daerah kurang tepat waktu. Renwarin & Sumtaky, (2019) juga menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan. Fungsi pengawasan adalah untuk menghindari perilaku yang tidak jujur, penyelewengan, kebocoran anggaran dan korupsi dalam pengelolaan keuangan (Yanto, 2019). Adanya pengawasan dapat menghasilkan informasi keuangan yang valid dan relevan (Nursewan, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>4b</sub>: Pengawasan berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah*

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer yang berisi tanggapan dari responden atas pernyataan dalam kuesioner. Populasi penelitian adalah Organisasi Pemerintah Daerah

(OPD) di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian merupakan pegawai bagian keuangan OPD Kabupaten Bantul, khususnya kepala atau staf bagian keuangan. Pemilihan populasi di Kabupaten Bantul dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa hasil opini di Kabupaten Bantul Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel pada tahun-tahun yang akan datang ([bkad.bantulkab.go.id](http://bkad.bantulkab.go.id)). Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja minimal 1 tahun dan tidak sedang dipindahkan dari instansi lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, keterandalan merupakan suatu kemampuan informasi dalam laporan keuangan daerah yang terhindar dari pemahaman yang menjerumuskan dan kesalahan material, menyampaikan informasi sesuai dengan kebenaran serta dapat diverifikasi. Indikator keterandalan berdasarkan penyajian jujur, kebenaran, penyelesaian perbedaan, informasi yang kredibel, tidak terikat, dan pengarahannya serta akan diuji dengan menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner ([Wardani & Andriyani, 2017](#)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 34 juga menjelaskan pelaporan keuangan daerah dapat dikatakan relevan bila mematuhi karakteristik ketepatanwaktuan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan dengan tepat waktu bisa memberikan informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Indikator ketepatanwaktuan yaitu informasi laporan, laporan yang sistematis, dan penyajian laporan teratur serta akan diuji dengan menggunakan 5 item pernyataan dalam kuesioner [Marlina & Wardani, \(2018\)](#) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan individu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai ([Yanto, 2019](#)). Indikator sumber daya manusia berdasarkan kemampuan individu, peran dan fungsi untuk mencapai tujuan, memahami prosedur dan proses akuntansi serta pelatihan yang teratur serta akan diuji dengan menggunakan 9 item pernyataan dalam kuesioner ([Wardani & Andriyani, 2017](#)).

Teknologi informasi merupakan suatu sistem berbasis TI yang dapat mengelola komponen-komponennya untuk mentransformasi data menjadi suatu informasi ([Marakas & O'brien, 2017](#)). Indikator pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan rangkaian tindakan melalui elektronik, pengelolaan dan dokumentasi data keuangan, pemrosesan informasi menggunakan jaringan internet, sistem manajemen, dan perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer serta diuji menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner ([Wardani & Andriyani, 2017](#)).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya visi organisasi melalui tindakan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Indikator sistem pengendalian internal berdasarkan perancangan yang sesuai, pembagian wewenang, dan penindakan kedisiplinan serta diuji dengan menggunakan 4 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani & Andriyani, 2017).

Pengawasan merupakan segala tindakan untuk menjamin dan menjaga agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari visi serta rencana yang telah dibuat (Yanto, 2019). Indikator pengawasan berdasarkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi berdasarkan bukti, pencatatan transaksi yang tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, dan laporan keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah serta diuji dengan menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner (Inayati & Reuni, 2018). Pengukuran pada variabel penelitian akan dilakukan dengan menggunakan skala linkert dengan nilai antara 1 sampai 5, yaitu 1 ekuivalen sangat tidak setuju, 2 ekuivalen tidak setuju, 3 ekuivalen kurang setuju, 4 ekuivalen setuju, dan 5 ekuivalen sangat setuju.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir	Korelasi	Sig. (2 -tailed)	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	X1.1	0,493	0,000**	Valid
	X1.2	0,239	0,020*	Valid
	X1.3	0,727	0,000**	Valid
	X1.4	0,791	0,000**	Valid
	X1.5	0,796	0,000**	Valid
	X1.6	0,730	0,000**	Valid
	X1.7	0,722	0,000**	Valid
	X1.8	0,697	0,000**	Valid
	X1.9	0,617	0,000**	Valid

\*\* Sig < 1%, \* Sig < 5%

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach alpha	N of Items	Keterangan
Kualitas SDM	0,749	9	Reliabel
Pemanfaatan TI	0,858	7	Reliabel
SPI	0,853	4	Reliabel
Pengawasan	0,904	7	Reliabel
Keterandalan	0,898	7	Reliabel
Ketepatanwaktuan	0,612	5	Reliabel

Berdasarkan hasil penelitian, kuesioner yang didistribusikan sebanyak 129. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 17 dengan angka persentase 13% kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 18. Sebanyak 94 kuesioner yang dapat diolah dengan angka persentase 73% sehingga. Setelah dilakukan analisis terhadap kuesioner yang kembali kemudian dilakukan

uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas untuk variabel kualitas sumber daya manusia ditunjukkan pada tabel 1 sedangkan hasil uji reliabilitas ditunjukkan tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan, keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah memiliki item pernyataan yang reliabel dengan nilai *cronbach's alpha* > 0,6.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>t</i>	<i>P value</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			
Kualitas SDM	0,240	0,073	0,320	3.304	0,001*
Pemanfaatan TI	0,094	0,065	0,124	1.436	0,154
SPI	0,379	0,139	0,272	2.719	0,008*
Pengawasan	0,186	0,073	0,232	2.556	0,012*
F hitung: 56,828					0,000**
Adj R Square: 0,719					

\*\* Sig < 1%, \* Sig < 5%

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>t</i>	<i>P value</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			
Kualitas SDM	0,082	0,060	0,150	1.363	0,176
Pemanfaatan TI	-0,025	0,056	-0,045	-0,446	0,656
SPI	0,688	0,114	0,681	6.032	0,000**
Pengawasan	0,093	0,063	0,159	1.475	0,144
F hitung: 43,330					0,000**
Adj R Square: 0,591					

\*\* Sig < 1%

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Informasi keuangan yang bersifat andal dihasilkan oleh sumber daya manusia yang paham dan mampu menerapkan sistem akuntansi. Hal ini dapat terjadi karena sumber daya manusia yang memiliki kualitas akan bekerja sesuai dengan tujuan organisasi yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang bernilai (Ariesta, 2013). Adanya kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan akan berdampak buruk pada kualitas informasi yang dihasilkan (Yanto, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Witono, (2014) dan Marlina & Wardani, (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam mengelola laporan keuangan milik pemerintah daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang dapat disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaannya yang membutuhkan banyak biaya. Implementasi teknologi informasi jadi kurang bermanfaat, menghabiskan banyak biaya namun kurang mendukung keandalan penyajian pelaporan keuangan (Wardani & Andriyani, 2017). Hal ini juga dapat terjadi karena beberapa sumber daya manusia pada pemerintah daerah tidak memiliki kompetensi dan latar belakang yang sesuai sehingga menyebabkan kurang maksimalnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang ada (Azlan *et al.*, 2015; Yanto, 2019). Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Wardani & Andriyani, (2017) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh atas keterandalan informasi pelaporan keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah menerapkan pengendalian intern sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Wardani & Andriyani (2017), Darwanis & Mahyani (2009), dan Wahyudi & Basri (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki sistem pengendalian yang tinggi, akan semakin andal dalam pelaporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena pemerintahan yang memiliki pengendalian yang baik akan dapat mengurangi kecurangan serta kesalahan dalam proses pengelolaan data laporan keuangan (Putra *et al.*, 2017).

Pengawasan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, artinya pengawasan yang ada di OPD Kabupaten Bantul sudah berjalan efektif. Hal ini dapat terjadi karena dilaksanakannya pengawasan yang menjamin kegiatan pemerintah tidak menyimpang dari misi dan rencana yang telah dibuat organisasi (Yanto, 2019). Pada dasarnya pengawasan digunakan untuk menghindari adanya penyelewengan dari visi organisasi, serta mampu mengevaluasi suatu kegiatan apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien (Putra *et al.*, 2017). Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Inayati & Reuni (2018), Yanto (2019), dan Azlan *et al.* (2015) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah.

Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah berarti bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia mengelola laporan keuangan belum tentu dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Yuliani *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa pemerintah daerah kurang memperhatikan latar belakang dan kompetensi sumber daya manusia. Keahlian sumber daya manusia dapat ditumbuhkan dengan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan secara berkala (Basuki *et al.*, 2016).

Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah kurang optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi. Penyebab lainnya yaitu kurangnya sumber daya

manusia yang berlatar belakang IT sehingga tidak ada perawatan berkala baik *hardware* maupun *software* serta pesatnya kemajuan IT yang tidak sebanding dengan penggunaannya (Dhonal *et al.*, 2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Marlina & Wardani, (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah, artinya OPD di Kabupaten Bantul sudah menjalankan pengendalian intern dengan maksimal. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yuliani *et al.*, 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Marlina & Wardani (2018) dan Sari & Arza (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan daerah.

Pengawasan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah artinya OPD di Kabupaten Bantul kurang menciptakan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu (Miharja *et al.*, 2020). Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Renwarin & Sumtaky, (2019) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Kedua kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat diberikan yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel penelitian karena banyak sedikitnya sampel dapat mempengaruhi hasil penelitian (Neuman, 2000). Saran kedua adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mewawancarai responden agar jawaban yang diberikan bersifat relevan dengan masalah penelitian, sehingga diperoleh data yang valid dan reliabel (Diantha, 2016).

## **Daftar Pustaka**

- Andelina, M.W. (2017). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 8(2), 132–153.
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *Tesis*, 1–17. <https://doi.org/10.1136/jcp.2007.047183>
- Attarie, P. N. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Studi empiris perusahaan yang terdaftar di BEI). *Cendekia Akuntansi*, 4(3), 45–59.

- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 188–198.
- Basuki, P., Pituringsih, E., & Rifa'i, A. (2016). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi pada SKPD di Kota Mataram. *Jurnal Valid*, 13(4), 359–368.
- Darwanis., & Mahyani, D. D. (2009). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 2(2), 133–151.
- Dhonal, R., Rahayu, S., & Yudi. (2018). Pengaruh pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi pada aparatur pemerintah di seluruh Dinas Kabupaten Bu. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA*, 3(1), 27–39.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian: Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Eisenhardt, K. (1989). Agency theory: An assesment and review. *Academy of Management Review* (pp. 57–74). <https://doi.org/10.1002/9781118371558>
- Elviani, S. (2017). Faktor-faktor berpengaruh bagi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 4(3), 1–10.
- Eristanti, B. D. A., & Putra, I. N. N. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 91–104.
- Hariandja, M. T. E. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Inayati., & Reuni, S. (2018). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD pemerintah Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 6(1), 174–186.
- Marakas, G. M., & O'brien, J. A. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Salemba Empat. <https://doi.org/10.1002/9781118371558>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.Yogyakarta
- Mareta, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi timeliness publikasi laporan keuangan periode 2009-2010 (Studi empiris pada Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, XIX(01), 93–108.
- Marlina., & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. *Jurnal Kajian Bisnis*, 26(2), 131–143.
- Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 148–161.
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Allyn and Bacon.
- Nursewan, K. (2015). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

- (Studi Pemerintah Provinsi Riau). *Jom FEKON*, 2(2), 1–13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pujiatmi., & Ismawati, K. (2018). Faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, VII(1), 43–76.
- Sari, R. P. (2019). Determinan keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *Accounting Global Journal*, 3(2), 118–137. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3802>
- Putra, R. A., Azlina, N., & Safitri, D. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen manajemen terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ben. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1037–1050.
- Rachmawi, S., Rini, R., & Fitri, Y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 143–160. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3589>
- Renwarin, F. D., & Sumtaky, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal ULET (Utility, Earning Dan Tax)*, 3(2), 41–54.
- Sari, A. P., Anisma, Y., & Rofika. (2017). Pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan. *JOM Fekon*, 4(1), 1137–1151. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sari, R. A., & Arza, F. I. (2016). Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan pengendalian interen akuntansi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal WRA*, 4(2), 845–858.
- Sari, S. P., & Witono, B. (2014). Keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. *Seminar Nasional Dan Call for Paper (Sancall 2014): Research Methods And Organizational Studies*, 418–425.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Andi.
- Wahyudi, F., & Basri, H. (2016). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan di lingkungan SKPD Kota Sabang. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 9(2), 67–74.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Yanto. (2019). Faktor–faktor yang mempengaruhi kehandalan nilai informasi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(1), 74–82.
- Yuliani, N. L., Susanto, B., & Farida, F. (2016). Analisis determinasi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i2.2919>  
<https://semarang.bpk.go.id/>  
<https://bkad.bantulkab.go.id/>